BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.[2] Dengan bentang alam yang cukup luas serta memiliki potensi sumder daya alam yang baik, Negara Indonesia mampu mewujudkan keragaman pangan dan gizi yang seimbang dalam pemenuhan kebutuhan pangan mandiri. Negara wajib memenuhi seluruh ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman pada tingkat keluarga, daerah, wilayah, maupun nasional dengan pemanfaatan potensi lokal yang ada.

Pemenuhan Konsumsi yang aman, bermutu, bergizi dan cukup dari segi kuantitas serta kualitas perlu diperhatikan dalam upaya tercukupinya diversifikasi ketersediaan pangan yang aman bagi setiap daerah. Diversifikasi, ketersediaan dan keamanan pangan yang ideal dicerminkan dalam skor Pola Pangan Harapan (PPH). Nilai skor Pola Pangan Harapan ini memberikan gambaran informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian ragam konsumsi pangan.[3] Dari segi ekonomi

---

[2] Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung dan Uneversitas Brawijaya, *Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018*, (Tulungagung : DKP Tulungagung, 2018), hal. 1

[3] *Ibid.,* hal. 1

keluarga, tingkat sosial ekonomi juga akan membawa dampak pada terciptanya diversifikasi pangan yang ideal.

Penyediaan pangan yang beraneka ragam serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman meruakan bagian dari tujuan penyelenggaraan pangan nasional. Regulasi yang mendukung pola konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi "Penganekaragaman pangan dilakukan untuk pemenuhan gizi masyarakat. Gizi yang dimaksud adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia".[4]

Pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari pada pertumbuhan penyediaannya. Permintaan yang meningkat cepat merupakan dampak dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli dan perubahan selera masyarakat. Pada sisi lain kapasitas produksi pangan juga mengalami pertumbuhan yang lambat dan cenderung stagnan, hal ini disebabkan kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya lahan serta stagnansi pertumbuhan produktivitas lahan dan tenaga kerja. Selain itu juga terdapat faktor eksternal sendiri yang bersumber dari pemanfaatan pupuk kimia yang berlebihan sehingga dapat merusak produktifitas lahan pertanian. Dari berkurangnya produktivitas lahan tersebut juga akan mempengaruhi tingkat

[4] Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan, *Penganekaragaman Pangan,* (Jakarta: Kementrian Pertanian Republik Indonesia, 2017), hal. 3

perkembangan perekonomian bagi petani karena lahan pertanian adalah sumber mata pencahariannya.

Peningkatan ketahanan pangan masyarakat masih menghadapi berbagai masalah baik pada sisi mikro maupun makro. Pada sisi mikro, upaya pemantapan ketahanan pangan menghadapi tantangan utama dengan masih besarnya proporsi penduduk yang mengalami kerawanan pangan mendadak karena bencana alam dan musibah serta kerawanan pangan kronis karena kemiskinan. Pada sisi makro, upaya pemantapan ketahanan pangan menghadapi tantangan utama pada peningkatan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pangan domestik dan peningkatan kapasitas produksi pangan dalam era keterbukaan ekonomi dan perdagangan global.[5]

Secara khusus pada sektor pedesaan, garis kemiskinan dan ketertinggalan sangat dominan pada masyarakat desa, dibandingkan dengan masyarakat kota. Secara garis besar, kemiskinan tersebut dipicu oleh beberapa faktor penghambat pergerakan dan perubahan masyarakat yang sifatnya ekonomis mikro, seperti kekurangan modal, tekhnologi yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang minim. Untuk melakukan pembangunan desa, pemerintah desa berupaya dalam melakukan berbagai program pembangunan, perencanaan dan implementasinya ternyata masih belum memberikan hasil yang optimal. Terdapat faktor hambatan yang bersumber dari dimensi sumber daya manusia desa dalam pemanfaatan potensi lahan dan potensi sumber daya yang tersedia

---

[5] Muhammad Husaini, *Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Kabupaten Barito Kuala,* (Jurnal Agribisnis Pedesaan: Vol. 02 No. 04, 2012) hal 321

masih belum berkembang. Disisi lain terdapat faktor yang menjadi pengaruh besar dalam perkembangan desa adalah faktor lokasi, atau tata letak desa terhadap pusat-pusat fasilitas dan jalan perhubungan (lancar atau tidak lancar).

Faktor faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat itu sangatlah banyak diantaranya seperti pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, jumlah barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat, tingkat suku bunga, perkiraan tentang masa depan, kebijakan pemerintah mengurangi ketimpangan pendapatan, demografi kependudukan.[6] Faktanya masyarakat pedesaan memang memiliki kondisi bentang wilayah yang luas. Khususnya pada desa yang memiliki letak geografis dataran tinggi seperti pada wilayah tulungagung bagian selatan dan juga wilayah yang terletak pada lereng Gunung Wilis. Kondisi infrastruktur seperti akses jalan perhubungan masih kurang layak seperti akses ke beberapa desa yang masih termasuk pelosok dalam wilayah pegunungan. Keterbatasan kondisi demografi wilayah juga menjadi salah satu faktor dari ketersediaan barang dan jasa atas konsumsi masyarakat.

Dalam perolehan pendapatan, setiap lapisan masyarakat tentunya mempunyai keahlian seperti menekuni setiap lapangan usaha dan status pekerjaan yang mereka geluti demi mencukupi kebutuhan hidup. Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 9 sektor yakni pertanian perkebunan kehutanan, perburuan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air; kontruksi; perdagangan, rumah makan dan hotel; angkutan pergudangan,

---

[6] Aang Curatman, *Teori Ekonomi Makro,* (Yogyakarta: Penerbit Swagati Press, 2010), hal 53

komunikasi; lembaga keuangan, penyewaan bangunan, serta jasa kemasyarakatan.

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2017	2018
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(7)**
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Peternakan	42,95	40,00	36,41	33,92	35,82
Pertambangan dan Penggalian	0,45	0,37	0,33	0,20	1,18
Industri pengolahan	17,53	19,35	16,61	18,37	17,83
Listrik, Gas, dan Air Minum	0,00	0,20	0,13	0,10	0,07
Kontruksi	5,90	6,67	8,72	8,11	6,45
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	17,76	18,86	22,69	20,23	23,07
Transportasi. Pergudangan, dan Komunikasi	1,25	1,58	2,58	2,81	2,57
Lembaga Keuangan, Real Estate, dan Usaha Persewaan	1,57	1,22	2,03	1,75	1,96
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	12,58	11,74	10,50	14,50	11,06

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung[7]

Secara umum masyarakat Kabupaten Tulungagung mayoritas lebih memanfaatkan lahan kearah sektor pertanian karena merupakan daerah yang berbasis agraris yakni pada tahun 2018 saja masih sebesar 35,82 persen. Berdasarkan hasil data BPS tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian

[7] BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab.Tulungagung 2018, hal 41

lebih berperan banyak dalam sumber perolehan pendapatan masyarakat. Bagi masyarakat kota yang kurang memiliki lahan pertanian, mereka lebih cenderung pada sumber pendapatan lain, seperti jasa seperti, perdagangan, dan juga pemanfaatan bangunan yang disewakan sebagai sumber mata pencaharian. Hal itu tercermin dari meningkatnya jumlah lapangan usaha dalam sektor perdagangan dan juga jasa akomodasi pada tahun 2018 meningkat menjadi 20,23 persen.

Pendapatan yang diperoleh oleh setiap anggota keluarga maka nantinya akan digunakan untuk konsumsi baik konsumsi pangan maupun non pangan. Menurut data BPS Tulungagung yang sudah bisa menggambarkan bagaimana pola konsumsi masyarakat Tulungagung pada tahun 2018 yang memiliki jumlah kepadatan penduduk sebanyak 1.015.974 jiwa. Berikut ini data rata – rata konsumsi per Kapita sebulan menurut kelompok komoditas dan kelompok pengeluaran (rupiah), 2018:

Tabel 1.2 Rata – rata konsumsi per kapita sebulan menurut kelompok komoditas dan kelompok pengeluaran (rupiah) 2018

Kelompok Komoditas		Kelompok Pengeluaran		
		40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
1	Padi-padian	49 586	55 408	62 607
2	Umbi-umbian	2 088	3 242	5 296
3	Ikan/udang/cumi/kerang	12 229	20 841	39 638
4	daging	4 926	12 442	32 549
5	Telur dan Susu	13 516	29 318	71 102
6	Sayur-sayuran	26 192	39 501	47 482
7	Kacang-kacangan	9 523	13 553	15 752

8	Buah-buahan	10 890	31 080	82 020
9	Minyak dan kelapa	10 803	16 529	18 990
10	Bahan minuman	11 611	15 785	23 564
11	Bumbu-bumbuhan	5 349	8 308	10 868
12	Komsumsi lainnya	5 597	9 369	12 660
13	Makanan dan minuman jadi	74 805	151 581	278 611
14	Rokok dan tembakau	18 579	53 246	78 672
	Jumlah Makanan	**225 695**	**460 204**	**779 808**
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	94 602	198 912	430 898
16	Aneka barang dan jasa	39 712	100 534	334 901
17	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	10 270	26 303	58 402
18	Barang tahan lama	3 769	24 929	321 891
19	Pajak, pungutan, dan asuransi	6 453	18 980	55 256
20	Keperluan pesta dan upacara/ kenduri	2 397	11 284	61 522
	Jumlah Bukan Makanan	**157 204**	**380 943**	**1 262 870**
	Jumlah Pengeluaran Kab. Tulungagung	**412 899**	**841 147**	**2 042 678**

Sumber: Badan Pusat Statistik Tulungagung[8]

Dari data diatas dapat terlihat bahwa tingkat konsumsi perkapita masyarakat Tulungagung perbulan untuk keperluan konsumsi pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah adalah sebesar Rp 412.899, keperluan konsumsi pada kelompok 40 persen tengah adalah sebesar Rp 841.147, dan keperluan konsumsi kelompok 20 persen teratas adalah sebesar Rp 2.042.678. Dengan mengacu pada pendapatan perkapita adalah sebesar Rp 2.993.518 per bulan pada tahun 2018 termasuk dalam golongan pendapatan sedang. Dengan pendapatan itu, semua pendapatan tidak mungkin digunakan untuk pengeluaran

[8] BPS, Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2019, hal 267

karena selain digunakan untuk pengeluaran, pendapatan bisa ditabung untuk kebutuhan masa mendatang. Khususnya pada masyarakat yang bermata pencaharian dalam sektor pertanian, mereka lebih cenderung mempunyai pasokan bahan pangan pokok lebih. Sehingga bagi masyarakat desa khususnya seorang petani, pendapatan yang diperoleh lebih cenderung diarahkan kesektor konsumsi non pangan ataupun digunakan untuk tabungan.

Masyarakat Tulungagung mayoritas bermata pencaharian adalah dalam sektor pertanian dimana sektor pertanian nantinya selain dapat menghasilkan sumber pendapatan secara materi, tetapi hasil pertanian juga dapat menjadi pasokan bahan pangan bagi keluarga yang cukup. Akan tetapi apabila terjadi penurunan harga bahan pangan dan juga kelangkaan sumber pendapatan dari sektor lain yang disebabkan oleh suatu kebijakan pemerintah, tentunya hal tersebut menjadi sebuah kondisi yang berdampak pada ketidak kestabilan antara perekonomian dan juga tingkat konsumsi masyarakat seperti yang terjadi pada tahun 2020 ini. Melihat dari latar belakang di atas, oleh karena itu penulis lebih tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakatdi Kabupaten Tulungagung**"

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Kabupaten Tulungagung?

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, perlu adanya identifikasi masalah penelitian agar penelitian yang dilakukan memiliki ruang lingkup yang jelas. Maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu terjadinya konsumsi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya faktor sosial dan faktor ekonomi. Dari segi faktor sosial, konsumsi dapat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga yang tertanggung, maka semakin tinggi jumlah anggota keluarga yang tertanggung maka akan semakin tinggi pula kebutuhan yang harus terpenuhi. Sedangkan dari faktor ekonomi, konsumsi secara langsung dapat dipengaruhi oleh pendapatan. Semakin tinggi total jumlah pendapatan keluarga maka akan meningkatkan keberagaman konsumsi keluarganya. Sedangkan dari segi jam kerja, apabila seseorang memeiliki jam kerja tinggi maka semakin besar beban kerja yang diterima dan secara tidak langung akan mempengaruhi konsumsi pangan maupun non pangan.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang dipilih adalah pendapatan perkapita masyarakat Tulungagung pada periode tahun 2010-2018.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian masyarakat secara mendalam dalam suatu periode tertentu.

3. Tingkat konsumsi masyarakat yang dibagi menjadi dua kategori yaitu konsumsi pangan dan konsumsi non pangan.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

F. Manfaat Penelitian

1. Dapat digunakan sebagai bahan kajian dan tindak lanjut, serta bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, instansi terkait, dan pihak swasta guna peningkatan kualitas mutu pangan masyarakat Kabupaten Tulungagung.
2. Dapat digunakan sebagai bahan kajian dan tindak lanjut terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai penunjang perekonomian masyarakat untuk meningkatkan pola pangan harapan yang lebih baik.

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual
   a. Pendapatan (X), merupakan suatu unsur penting dalam perekonomian yang berperan meningkatkan derajat hidup orang banyak melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya. Pendapatan rumah tangga amat

besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin baik (tinggi) tingkat pendapatan, tingkat konsumsi akan semakin tinggi.[9]

b. Konsumsi Masyarakat (Y), pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang barang dan jasa – jasa untuk kebutuhan hidup sehari - hari dalam suatu periode tertentu.[10]

2. Penegasan Operasional

a. Pendapatan (X), yaitu imbal balik yang diperoleh masyarakat dari hasil pekerjaan, bonus, deviden atau pemberian dari orang lain yang diukur dalam satuan uang (rupiah). Indikator untuk mengukur pendapatan masyarakat adalah pendapatan perbulan.

b. Konsumsi masyarakat (Y), yaitu nilai pengeluaran yang diperoleh dari besarnya pengeluaran masyarakat atas barang dan jasa pada periode tertentu yang diukur dalam satuan mata uang (rupiah). Indikator untuk mengukur tingkat konsumsi adalah pengeluaran makanan dan non makanan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Urutan untuk mempermudah dalam memahami isi proposal maka sistematika penulisannya yaitu:

---

[9] Aang Curatman, *Teori Ekonomi ...*, hal 54

[10] Muhammad Abdul Halim, *Teori Ekonomika,* Edisi 1, (Jakarta: Jelajah Nusa, 2012), hal 47

1. **BAB I** **PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan pembahasan, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan

2. **BAB II** **LANDASAN TEORI**

Kerangka teori, dalam bab ini terdapat 4 bagian yaitu pertama landasan teori yang berisi uraian literatur, jurnal, referensi dan lain lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kedua, penelitian ini berisi kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Ketiga, berisi kerangka berpikir untuk menyusun hipotesis yang dirumuskan. Keempat berisi tentang hipotesis penelitian.

3. **BAB III** **METODE PENELITIAN**

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis terakhir

4. **BAB IV** **HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan terkait deskripsi data hasil penelitian dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

5. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian, hasil pembahasan terkait analisis data.

6 BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan penelitian dan saran, bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran – lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.